



Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Mutiara Sabila¹, Muhammad Rizal Saragih²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

¹mutiarasabila18@gmail.com, ²dosen01465@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, *tunneling incentive*, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Urgensi penelitian ini didasari oleh fenomena fluktuasi penerimaan pajak negara dan adanya dugaan praktik manajemen pajak yang agresif pada sektor barang konsumsi guna menjaga stabilitas laba di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh secara konsisten dari laporan keuangan tahunan auditan. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals*, di mana melalui teknik purposive sampling diperoleh 11 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan total 55 unit observasi selama lima tahun pengamatan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Berdasarkan hasil pengujian teknis, *Common Effect Model (CEM)* terpilih sebagai model estimasi terbaik setelah melalui serangkaian uji formal yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mengoptimalkan celah regulasi untuk meminimalkan beban fiskal. Sebaliknya, *tunneling incentive* dan kepemilikan manajerial terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyiratkan bahwa kebijakan penghindaran pajak pada sektor ini lebih didominasi oleh strategi perencanaan pajak yang sistematis dibandingkan faktor struktur kepemilikan maupun dorongan insentif dari pemegang saham pengendali. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam mengevaluasi kebijakan pengawasan fiskal.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan Manajerial.

1. Latar Belakang

Pendapatan negara Indonesia secara dominan bersumber dari sektor perpajakan yang kontribusinya secara konsisten mendominasi struktur APBN hingga kisaran 80% [1]. Pajak menjalankan peran fundamental sebagai instrumen pendanaan utama untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, hingga fungsi stabilisasi ekonomi [2]. Namun, realisasi penerimaan pajak dalam tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, sebagaimana tersaji dalam data target dan realisasi penerimaan pajak berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2020-2024
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2020	Rp 1.198,8 triliun	Rp 1.070,0 triliun	83,9%
2021	Rp 1.229,6 triliun	Rp 1.231,87 triliun	100,19%
2022	Rp 1.485,1 triliun	Rp 1.716,8 triliun	115,6%
2023	Rp 1.818,3 triliun	Rp 1.869,23 triliun	102,80%
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp 1.932,4 triliun	97,2%

Sumber data: www.kemenkeu.go.id, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1, fenomena kesenjangan fiskal terlihat jelas pada tahun 2024, di mana realisasi penerimaan hanya mencapai 97,2%. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 sempat terjadi surplus, tren penurunan kembali di tahun 2024 mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak bersifat situasional dan rentan terhadap praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Secara teoretis, perusahaan memiliki kecenderungan untuk meminimalisir

liabilitas pajak guna mengoptimalkan laba bersih dan menjaga stabilitas arus kas, yang sering kali menciptakan dikotomi kepentingan antara sektor swasta dan pemerintah [3].

Fenomena penghindaran pajak ini dipertegas oleh kasus yang melibatkan PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) pada Juni 2024. Berdasarkan laporan investigasi, beberapa anak perusahaan AAL diduga melakukan aktivitas operasional tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah di kawasan hutan, yang memicu potensi kerugian negara dari sektor pajak sebesar Rp400 miliar per tahun. Kasus ini bukan sekadar masalah pelanggaran regulasi lahan, melainkan representasi dari strategi penghindaran kewajiban fiskal yang sistematis melalui kelemahan tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa entitas besar memiliki kapabilitas untuk mengeksplorasi ambiguitas hukum demi mencapai efisiensi biaya pajak yang maksimal [4].

Fenomena ketidakpatuhan fiskal ini dapat dibedah secara mendalam melalui Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam perspektif ini, hubungan antara pemerintah dengan perusahaan, maupun antara pemegang saham dengan manajer, sering kali diwarnai oleh asimetri informasi. Manajer sebagai agen memiliki akses informasi internal yang lebih luas dibandingkan prinsipal, yang kemudian memicu perilaku oportunistik melalui manipulasi laba dan efisiensi pajak yang agresif demi terlihat berprestasi secara finansial [5] [6]. Ketidakseimbangan informasi ini diperparah dengan penerapan Teori Sinyal (*Signaling Theory*), di mana kebijakan perpajakan perusahaan dikomunikasikan secara sukarela kepada publik. Namun, sinyal berupa perencanaan pajak yang efisien sering kali bersifat ambivalen; pasar dapat menangkapnya sebagai bentuk manajemen keuangan yang cerdas (positif) atau justru sebagai indikasi risiko hukum yang tinggi (negatif) [7] [8].

Dalam upaya menekan liabilitas fiskal tersebut, perusahaan menerapkan Perencanaan Pajak (X1). Secara strategis, variabel ini melibatkan identifikasi *loopholes* dalam regulasi untuk mengoptimalkan laba pascapajak (*after-tax return*). Efektivitas strategi ini tercermin pada penurunan *Effective Tax Rate* (ETR), yang meskipun legal, sering kali mendekati batas ketidakpatuhan [9]. Kompleksitas ini diperberat dengan adanya *Tunneling Incentive* (X2), sebuah tindakan di mana pemegang saham pengendali memanfaatkan otoritasnya untuk mengalihkan kekayaan perusahaan kepada pihak berelasi. Melalui mekanisme *transfer pricing*, laba ditekan sedemikian rupa agar beban pajak berkurang, yang pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas sekaligus menggerus basis pajak negara [10].

Peran kontrol kemudian diharapkan muncul melalui Kepemilikan Manajerial (X3). Porsi saham yang dimiliki manajemen seharusnya menciptakan keselarasan kepentingan (*alignment of interest*), di mana manajer turut memikul konsekuensi ekonomi dari setiap kebijakan pajak yang diambil. Namun, fakta empiris menunjukkan dinamika yang berbeda; kepemilikan saham sering kali justru memotivasi manajer untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih berani guna meningkatkan laba bersih yang berdampak pada dividen pribadi mereka. Diskrepansi orientasi antara pengelola dan pemilik inilah yang mendasari munculnya praktik Penghindaran Pajak (Y) sebagai manifestasi dari konflik kepentingan yang belum terpecahkan dalam tata kelola perusahaan [11].

Alasan utama penelitian ini dilakukan adalah untuk mengisi kesenjangan hasil dari studi-studi terdahulu yang masih menunjukkan inkonsistensi, serta memberikan bukti baru mengenai bagaimana struktur kepemilikan dan perencanaan internal merespons fluktuasi ekonomi pasca-pandemi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menguji keterkaitan antara Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2020-2024. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang diekstraksi melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). Proses pengumpulan data dilaksanakan mulai Oktober 2024 hingga Desember 2025.

2.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel dan rumus variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Pengukuran masing-masing variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Ukur Data
X ₁ = Perencanaan Pajak [9]	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
X ₂ = Tunneling Incentive [12]	$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
X ₃ = Kepemilikan Manajerial [13]	$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Y = Penghindaran Pajak [14]	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber: Data diolah Penulis, (2025).

2.2. Teknik Pengambilan Sampel

Prosedur pengambilan sampel dan teknik pengerjaan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Perusahaan yang termasuk kedalam kategori *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun penelitian yaitu tahun 2020-2024; (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode tahun 2020-2024; (3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan menggunakan mata uang rupiah; (4) Perusahaan yang mengalami laba selama periode tahun 2020-2024; (5) Perusahaan yang mempunyai kelengkapan data variabel.

Proses penentuan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan unit observasi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dari total populasi sebanyak 129 perusahaan, terpilih 18 perusahaan yang memenuhi kriteria awal. Namun, dalam tahap prapemrosesan data, ditemukan 7 perusahaan yang memiliki nilai pengamatan ekstrem (*outlier*) yang berpotensi membiaskan hasil regresi [15]. Hasil akhir menunjukkan terdapat 11 perusahaan yang layak digunakan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2020-2024), maka total unit observasi yang diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 data laporan keuangan. Pengurangan sampel melalui deteksi *outlier* ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang tersimpan memiliki distribusi yang lebih normal dan mampu memberikan hasil estimasi terbaik dalam pengujian model regresi nantinya.

Tabel 3. Perusahaan Non-Cyclicals yang menjadi Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
2	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk.
3	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
4	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.
5	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk.
6	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
7	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.
8	MYOR	Mayora Indah Tbk.
9	STTP	Siantar Top Tbk.
10	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
11	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Sumber: Data diolah Penulis, (2025).

3. Hasil dan Diskusi

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 10/31/25
 Time: 19:24
 Sample: 2020 2024

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.216469	0.210359	0.720662	0.108653
Median	0.213605	0.215535	0.768800	0.010443
Maximum	0.331885	0.295684	0.924745	0.545014
Minimum	0.017323	0.021423	0.349257	0.000157
Std. Dev.	0.054949	0.038363	0.165952	0.171151
Skewness	-0.491407	-2.087423	-0.297550	1.302131
Kurtosis	4.668894	12.42351	1.692718	3.066358
Jarque-Bera	8.596347	243.4479	4.728008	15.55258
Probability	0.013593	0.000000	0.094043	0.000420
Sum	11.90577	11.56973	39.63643	5.975930
Sum Sq. Dev.	0.163048	0.079471	1.487162	1.581798
Observations	55	55	55	55

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

X1 = Perencanaan Pajak

X2 = *Tunneling Incentive*

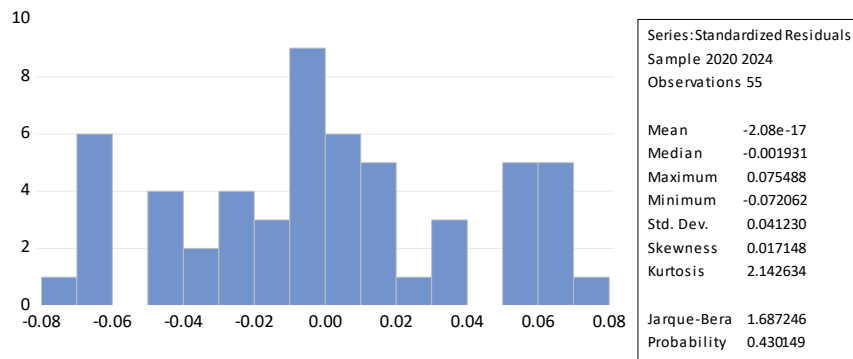
X3 = Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan Tabel 4, variabel dependen Penghindaran Pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,216469, yang mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sampel berada pada kisaran 21,65%. Nilai maksimum sebesar 0,331885 dicapai oleh PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk pada tahun 2022, sedangkan nilai minimum sebesar 0,017323 dimiliki oleh PT Sariguna Primatirta Tbk pada tahun 2021. Rendahnya nilai standar deviasi (0,054949) dibandingkan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa data variabel ini bersifat homogen. Kondisi serupa terlihat pada variabel Perencanaan Pajak dengan nilai rata-rata 0,210359 (21,04%) dan standar deviasi yang sangat kecil (0,038363), mempertegas tingkat dispersi yang rendah di antara perusahaan sampel. Nilai tertinggi pada variabel ini tercatat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2020 (0,295684), sementara nilai terendahnya dimiliki oleh PT Sariguna Primatirta Tbk tahun 2021 (0,021423). Lebih lanjut, variabel *Tunneling Incentive* mencatat nilai rata-rata yang cukup dominan sebesar 0,720662. PT Enseval Putera Megatrading Tbk secara konsisten mencatatkan nilai maksimum sebesar 0,924745 selama periode 2020-2023, sedangkan nilai minimum sebesar 0,349257 ditemukan pada PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun 2024. Nilai standar deviasi sebesar 0,165952 menunjukkan keragaman data yang moderat. Kontras dengan variabel lainnya, Kepemilikan Manajerial menunjukkan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi, di mana nilai standar deviasi (0,171151) lebih besar daripada nilai rata-ratanya (0,108653). Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan struktur kepemilikan yang lebar, di mana PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk memiliki konsentrasi kepemilikan manajerial tertinggi sebesar 54,50% pada tahun 2024, sementara PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kepemilikan yang mendekati nol (0,000157) secara konsisten di seluruh periode penelitian.

3.1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan estimasi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Hasil pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian *Jarque-Bera* (JB), diperoleh nilai statistik sebesar 1,687246 dengan probabilitas 0,430149. Karena nilai probabilitas melampaui tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka residual model berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 10/31/25 Time: 19:15
 Sample: 1 55
 Included observations: 55

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.001739	53.13696	NA
X1	0.023025	32.15068	1.016627
X2	0.001300	21.70490	1.074108
X3	0.001242	1.539293	1.091322

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Hasil deteksi melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (X1, X2, X3) memiliki nilai VIF di bawah 10,00. Hal ini mengonfirmasi tidak adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.943070	Prob. F(3,51)	0.1344
Obs*R-squared	5.641581	Prob. Chi-Square(3)	0.1304
Scaled explained SS	5.070104	Prob. Chi-Square(3)	0.1667

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Melalui uji Glejser, diperoleh nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar 0,1304. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, model dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.040853	R-squared	0.437011
Mean dependent var	0.216469	Adjusted R-squared	0.403894
S.D. dependent var	0.054949	S.E. of regression	0.042425
Akaike info criterion	-3.412209	Sum squared resid	0.091794
Schwarz criterion	-3.266221	Log likelihood	97.83574
Hannan-Quinn criter.	-3.355754	F-statistic	13.19598
Durbin-Watson stat	1.857997	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel hasil regresi, nilai Durbin-Watson (DW) adalah 1.857997. Dengan $n=55$ dan $k=3$, nilai batas atas (dU) adalah 1.6815. Relasi yang dihasilkan adalah $1.6815 (dU) < 1.857997 (DW) < 2.3185 (4-dU)$, sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model.

3.2. Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Root MSE	0.040853	R-squared	0.437011
Mean dependent var	0.216469	Adjusted R-squared	0.403894
S.D. dependent var	0.054949	S.E. of regression	0.042425
Akaike info criterion	-3.412209	Sum squared resid	0.091794
Schwarz criterion	-3.266221	Log likelihood	97.83574
Hannan-Quinn criter.	-3.355754	F-statistic	13.19598
Durbin-Watson stat	1.857997	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,403894 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel penghindaran pajak adalah sebesar 40,39%. Sementara itu, sisa variasi sebesar 59,61% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, maupun mekanisme tata kelola lainnya.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Root MSE	0.040853	R-squared	0.437011
Mean dependent var	0.216469	Adjusted R-squared	0.403894
S.D. dependent var	0.054949	S.E. of regression	0.042425
Akaike info criterion	-3.412209	Sum squared resid	0.091794
Schwarz criterion	-3.266221	Log likelihood	97.83574
Hannan-Quinn criter.	-3.355754	F-statistic	13.19598
Durbin-Watson stat	1.857997	Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,19598 yang secara signifikan lebih besar dari F tabel (2,786229). Hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas sebesar 0,000002 yang jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, model regresi dinyatakan fit dan layak untuk memprediksi pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.038121	0.041700	0.914167	0.3649
X1	0.901376	0.151739	5.940293	0.0000
X2	-0.021180	0.036055	-0.587441	0.5595
X3	0.036805	0.035239	1.044442	0.3012

Sumber: *Output Eviews 12*, 2025

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa perencanaan pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Y) dengan nilai probabilitas 0,0000. Koefisien regresi sebesar 0,9013 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan strategi perencanaan pajak secara linear akan meningkatkan agresivitas penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan teori agensi, di mana manajer (agen) menggunakan perencanaan pajak sebagai alat strategis untuk menunjukkan kinerja laba yang optimal kepada prinsipal melalui efisiensi beban fiskal.

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial menunjukkan *tunneling incentive* (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (probabilitas 0,5595 > 0,05). Dalam perspektif teori sinyal, perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* cenderung menghindari praktik pajak yang agresif meski memiliki potensi transaksi pihak berelasi. Hal ini dilakukan guna mengirimkan sinyal positif kepada pasar bahwa tidak terjadi pengalihan kekayaan yang merugikan investor minoritas, sehingga kepercayaan pasar tetap terjaga melalui transparansi kepatuhan pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial (X3) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai probabilitas 0,3012. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi *alignment of interest* dalam teori agensi belum berjalan efektif pada sampel penelitian. Rendahnya rata-rata porsi saham manajer mengakibatkan fungsi kontrol mereka tidak dominan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan. Manajer lebih memprioritaskan reputasi jangka panjang dan menghindari risiko sanksi hukum yang melekat pada praktik penghindaran pajak yang agresif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa secara simultan Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2020-2024, yang dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 13,19598 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000002. Secara parsial, hanya perencanaan pajak yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung sebesar 5,940293 dan signifikansi 0,0000, yang mengindikasikan bahwa setiap penguatan strategi manajemen pajak berbanding lurus dengan peningkatan agresivitas penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, *tunneling incentive* dengan nilai t hitung -0,587441 serta kepemilikan manajerial dengan nilai t hitung 1,044442 tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sehingga kedua faktor tata kelola tersebut belum menjadi determinan utama dalam kebijakan fiskal pada sampel penelitian ini. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak adalah sebesar 40,39% sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared*, sementara 59,61% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penghindaran pajak pada sektor barang konsumen non-siklikal lebih didominasi oleh motif efisiensi biaya melalui perencanaan pajak yang agresif dibandingkan dorongan struktur kepemilikan. Aplikasi praktis dari hasil ini dapat digunakan oleh otoritas perpajakan untuk melakukan pemetaan risiko berdasarkan intensitas perencanaan pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, terdapat spekulasi bahwa perusahaan lebih memprioritaskan reputasi jangka panjang dan sinyal positif kepada pasar daripada mengeksploitasi hak kendali manajerial maupun *tunneling incentive* untuk menghindari pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan variabel dengan menyertakan faktor eksternal seperti ukuran perusahaan, *leverage*, atau koneksi politik, serta memperpanjang periode pengamatan guna menangkap dinamika kebijakan pajak yang lebih komprehensif.

Referensi

- [1] A. K. Putri and T. Taun, "Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. 1, pp. 198–209, 2023, doi: <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838> p-ISSN:
- [2] U. Faruq, S. Adipurno, A. Aziz, N. Faadhilah, and M. Ridwan, "Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, pp. 66–70, 2024, doi: <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>.
- [3] Y. V. Kusufiyah and D. Anggraini, "Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Yunita," *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 25, no. 1, pp. 11–21, 2023.
- [4] S. Lahay, "Laporan Terbaru Ungkap Dugaan Pelanggaran di Perusahaan Sawit Astra," mangobay.co.id. Accessed: Jan. 21, 2026. [Online]. Available: <https://mongabay.co.id/2024/06/28/laporan-terbaru-ungkap-dugaan-pelanggaran-di-perusahaan-sawit-astra/>
- [5] F. Nurfitriani and A. Hidayat, "PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, TINGKAT HUTANG DAN KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP MANAJEMEN PAJAK," *IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 10, no. 1, pp. 1–18, 2021, doi: <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>.
- [6] W. Rusdiani and Umaimah, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidan," *J. Cult. Account. Audit.*, vol. 2, no. 2, pp. 54–68, 2023, [Online]. Available: <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
- [7] V. K. Subroto and E. Endaryati, *Kumpulan Teori Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2024.
- [8] Khairunnisa and C. W. Lubis, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Bank Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2020," *GEMILANG J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–14, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/view/410/410>
- [9] D. D. A. Putri, "PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)," *LITERA J. Literasi Akunt.*, vol. 3, no. 2, pp. 80–86, 2023, doi: 10.55587/jla.v3i2.86.
- [10] M. R. Saragih and Rusdi, "PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, TAX MINIMIZATION DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP PRAKTIK TRANSFER PRICING," *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 7, no. 4, pp. 1255–1269, 2024.
- [11] T. R. Wulandari and L. J. Purnomo, "UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PENGHINDARAN PAJAK," *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 21, no. 1, pp. 102–115, 2021, [Online]. Available: www.jab.fe.uns.ac.id
- [12] N. A. Nurulita and A. Yulianto, "Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance," *JPNM (Jurnal Pustaka Nusant. Multidisplin)*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2023.
- [13] W. K. Wardhani and Y. C. Samrotun, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, vol. 20, no. 2, pp. 475–481, 2020.
- [14] S. Yuliyanti and R. Oktavianna, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance," *J. IKRAITH-EKONOMIKA*, vol. 8, no. 2, pp. 1158–1166, 2025, doi: <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>.
- [15] Fitri Ayuning Tyas, Mahda Nurayuni, and Hidayatur Rakhmawati, "Optimasi Algoritma K-Nearest Neighbors Berdasarkan Perbandingan Analisis Outlier (Berbasis Jarak, Kepadatan, LOF)," *J. Nas. Tek. Elektro dan Teknol. Inf.*, vol. 13, no. 2, pp. 108–115, 2024, doi: 10.22146/jnteti.v13i2.9579.